

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 22 yang dinyatakan bahwa akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelayakan program dari satuan pendidikan sesuai dengan standar dari akreditasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga setiap satuan pendidikan diharapkan agar bisa mengikuti aturan yang telah di buat (Dwinita Apriyani Rangkuti, 2023).

Akreditasi menjadi bagian yang cukup diperhatikan oleh pemerintah, karena melalui akreditasi kelayakan dari satuan pendidikan akan terjamin dan dampaknya bisa dirasakan oleh banyak pihak, baik itu satuan pendidikan, kepala lembaga, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan terutama bagi peserta didik, sebab ilmu pendidikan yang akan diberikan oleh pendidik lebih berkualitas sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang berlaku.

Akreditasi dapat dilakukan setiap tahunnya bagi setiap satuan pendidikan yang belum pernah mengikuti akreditasi, sedangkan bagi yang sudah pernah diakreditasi sesuai dengan masa berlakunya habis. Hal ini dibukti dengan jumlah satuan pendidikan yang telah akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2024 dengan total sebanyak 46.264 PAUD yang di unggah oleh website BAN-PDM (BAN-PDM, 2024).

Pada perkembangan zaman saat ini, banyak orang yang mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini, layaknya sedang berlomba-lomba dalam dunia bisnis, tapi bisnis kali ini dengan mendirikan satuan lembaga pendidikan dan target utamanya adalah anak-anak usia dini. Dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan anak usia dini, masih banyak lembaga yang kurang peduli dan kurang memahami mengenai beberapa standar yang telah ditetapkan, padahal pemerintah telah membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk menyamaratakan pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu TK/RA, KB, TPA dan SPS.

Pemahaman kepala sekolah dan guru-guru terhadap pentingnya akreditasi masih sangat bervariasi. Pada kondisi saat ini beberapa lembaga pendidikan hanya fokus mencari tahu bagaimana caranya untuk dapat mengejar target dengan banyaknya jumlah murid yang mau bersekolah di lembaganya saja, tanpa ada pemikiran untuk mengejar target kelayakan dari satuan lembaga yang seharusnya menjadi prioritas utama. Bahkan, banyak satuan pendidikan yang telah terakreditasi namun masih memerlukan banyak perbaikan, apalagi dengan satuan pendidikan yang belum pernah melakukan akreditasi, bisa jadi lebih banyak hal yang harus dievaluasi.

Akreditasi menjadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan mutu maupun kualitas satuan pendidikan, guna mendapatkan pengakuan mengenai kelayakan satuan pendidikan dan sangat disayangkan jika dianggap sebelah mata saja. Berkaitan dengan dilaksanakannya akreditasi, masih terdapat beberapa persepsi dari kepala sekolah maupun guru-guru mengenai kurangnya pemahaman tentang makna

dari dilakukannya akreditasi, sehingga hanya menganggap sebagai beban tambahan yang harus dipenuhi dengan berbagai kelengkapan fisik dan dokumen, guna mendapatkan penilaian yang tinggi tanpa mengetahui apa saja manfaat yang akan didapat setelah dilaksanakannya akreditasi (Trysia, 2018:32).

Pelaksanaan akreditasi menurut guru dan kepala sekolah merasa cukup memakan waktu, sebab harus melalui beberapa tahapan mulai dari pengajuan akreditasi, konfirmasi sasaran visitasi, pengisian sispena, koordinasi dengan asesor sebagai , baru setelah itu dilakukan visitasi dan terakhir adalah pengumuman hasil dari akreditasi. Hal-hal tersebut yang terkadang membuat beberapa guru harus mencuri waktu untuk mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan selama proses akreditasi sehingga kualitas pembelajaran bisa menjadi kurang maksimal.

Peranan kepala sekolah maupun guru sangatlah penting namun jika proses pengerjaan akreditasi hanya mengandalkan salah satunya tentu akan terasa terbebani, baik itu beban yang dilimpah untuk guru-guru saja, atau bahkan bebannya hanya diberikan kepada satu orang saja, tentu akan membuat guru-guru yang lain tidak memahami apa saja yang harus dilalui agar satuan pendidikan tersebut memiliki bukti kelayakan.

Kurang optimalnya peran kepala sekolah dalam manajemen juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab dalam ketidakefektifan pelaksanaan akreditasi dan secara tidak langsung tidak efektif pada kegiatan sehari-hari di satuan lembaga. Hal ini dapat membuat guru dan kepala sekolah kurang

berkolaborasi dalam melakukan pemenuhan instrumen-instrumen yang ada di dalam akreditasi.

Dengan terjadinya beberapa masalah tersebut, tentu akan mempengaruhi penilaian akreditasi, karena semata-mata hanya menganggap sebatas pemenuhan administrasi, sehingga akan membuat proses, pelaksanaan hingga ke hasil tidak akan berjalan maksimal, tidak sebanding dengan harapan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan terasa sia-sia.

Pemerintah pasti memiliki tujuan dengan dibuatnya standar-standar yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan agar mempunyai kualitas yang sama dari sisi kelayakan, sehingga perbedaan hanya bisa dilihat dari bagian keunggulan masing-masing lembaga bukan dari sisi layak atau tidaknya lembaga tersebut.

Hasil yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi Jakarta, bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan setelah itu harus melakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh asesor baik itu dari pengelolaan administrasi, dokumentasi hingga perubahan metode pembelajaran (Oktaria et al., 2019)

Dengan penjelasan yang telah diuraikan hingga permasalahan yang terjadi, untuk itu penulis ingin mengetahui terkait dengan adanya persepsi kepala sekolah dan guru terhadap akreditasi lembaga paud oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, tentang apa yang

sebenarnya terjadi di satuan pendidikan “BKB PAUD Harapan Ibu” sebagai studi kasus agar bisa mengeksplorasi lebih dalam, akankah persepsi itu dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dari hasil hasil akreditasi. Diharapkan bisa melakukan pendekatan secara efektif dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan komitmen tinggi bahwa akreditasi itu sangat penting untuk kepentingan bersama dan sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap akreditasi.
2. Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh kepala sekolah dan guru mengenai pentingnya akreditasi.
3. Kepala sekolah dan guru yang masih menganggap akreditasi hanya bagian dari formalitas.
4. Kurangnya peranan dari kepala sekolah dalam pelaksanaan proses akreditasi.
5. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan akreditasi hanya dijadikan sebagai bentuk pembuktian kepada orang tua maupun masyarakat terhadap kelayakan di satuan lembaga pendidikan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dapat dibatasi hanya pada:

1. Pemahaman kepala sekolah dan guru mengenai akreditasi.
2. Tanggapan terkait hasil dari akreditasi.
3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh satuan lembaga pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai *“Persepsi Kepala Sekolah Dan Guru Terhadap Akreditasi Lembaga Paud Oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025”* berikut ini adalah rumusan masalah:

1. Bagaimana persepsi kepala sekolah terhadap proses, hasil serta dampak yang terjadi dari akreditasi di satuan lembaga BKB PAUD Harapan Ibu?
2. Bagaimana persepsi dari guru terhadap proses dan hasil dari akreditasi di satuan lembaga BKB PAUD Harapan Ibu?

Bagaimana persepsi guru dan kepala sekolah untuk menindaklanjuti terkait hasil akreditasi dalam peningkatan mutu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan:

1. Mengetahui persepsi dari guru terhadap proses dan hasil dari akreditasi di satuan lembaga BKB PAUD Harapan Ibu.

2. Mengetahui persepsi kepala sekolah terhadap proses, hasil serta dampak yang terjadi dari akreditasi di satuan lembaga BKB PAUD Harapan Ibu.
3. Mengetahui persepsi guru dan kepala sekolah untuk menindaklanjuti terkait hasil dakreditasi dalam peningkatan mutu.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis akan membantu dalam menggali mengenai pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor baik itu internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi kepala sekolah berserta dengan guru-guru terhadap akreditasi.

2. Manfaat Praktis

- 1.) Bagi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini yang dilakukan untuk memberikan informasi bagi pembuat kebijakan agar melakukan perbaikan sistem akreditasi. Pada saat ini sistem akreditasi hanya menekankan pada bidang administrasi saja sehingga kurang pada bagian pedagogik. Diharapkan untuk melakukan revisi terkait kebijakan guna menyeimbangkan kedua aspek tersebut

- 2.) Bagi Satuan Pendidikan

Hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan persepsi kepala sekolah dan guru, diharapkan mampu membantu satuan pendidikan dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan akreditasi yang lebih baik lagi. Satuan lembaga dapat mengatasi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi dalam penelitian untuk meningkatkan kualitas dari satuan pendidikan.

3.) Bagi Kepala sekolah dan Guru

Dengan dilakukannya penelitian ini dan sudah berdasarkan identifikasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan komitmen kepala sekolah serta guru-guru dalam pelaksanaan proses akreditasi. Informasi ini dapat digunakan untuk program pelatihan dan pengembangan keprofesionalan yang lebih efektif bagi guru.